

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**EHTRATULILLAHI**

**1710111029**

**PEMBIMBING**

**YUNITA SOFYAN SH., MH.**

**DELFINA GUSMAN., SH., MH.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)**




**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>FHITRATUL ILLAHI</b>	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Basung/13 September 1999	f) Tanggal Lulus : 22 Juli 2022	g) Predikat Pujian : Dengan Pujian
b) Nama Orang Tua : Sudirman	h) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan	i) IPK : 3.88	j) Alamat : Lubuk Basung
c) Fakultas : Hukum			
d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara			
e) No.Bp. : 1710111029			

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN**

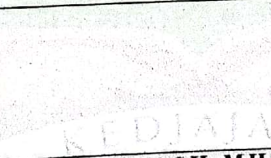
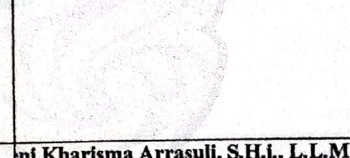
**2014 TENTANG KESEHATAN JIWA**

(Fhitratul Illahi, 1710111029, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2021)

**ABSTRAK**

Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat ODGJ memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pemenuhan hak kesehatan terhadap ODGJ merupakan tanggungjawab negara terutama pemerintah. Banyak perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan penyelenggara kesehatan terhadap ODGJ di Indonesia. *Human Rights Watch* menemukan dan mendokumentasikan 143 orang dipasung dan baru dilepaskan dari pasungan beberapa tahun terakhir, 200 kasus serupa dilaporkan di rumah sakit jiwa Bengkulu dan 25 kasus kekerasan lainnya. Oleh karena itu perlu pemenuhan hak kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa perlu dikaji secara intensif. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan mengetahui upaya pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan terhadap ODGJ. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian, penulis pemerintah belum maksimal dalam melakukan upaya kesehatan jiwa terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan jiwa dan tenaga medis jiwa. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan ODGJ.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juli 2021.

Tanda Tangan		
Nama terang	Henny Andriani, S.H., M.H	Arfiani Kharisma Arrasuli, S.H.I., L.L.M

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Arfiani, S.H., M.H**

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: